

**TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

(Di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



**OLEH:**

**ARTHO UMBU NGGALA TALU JAWA**

**2016210033**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Otonomi daerah yang rendah meningkatkan tujuan dan manajemen berbasis pengetahuan. Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat di Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sewu Dau, Malang. Diperlukan data primer dan sekunder. Pengambilan sampel menemukan subjek penelitian. Dokumen, wawancara, dan observasi memberikan data. Studi merangkum dan melihat data. Transkripsi meningkatkan keandalan data. Sedikitnya peningkatan jumlah penduduk miskin dan rendahnya kualitas hidup masyarakat menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum menghapus kemiskinan, bahkan bagi mereka yang menganutnya. Salah satu faktor penyebab minimnya kemajuan adalah anggapan yang mendasari program pemberdayaan pemerintah. Menurut teori ini, komunitas tidak mampu memuaskan kebutuhan anggota individunya.

**Kata Kunci :** Tahapan, Program Pemberdayaan Masyarakat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia berpenduduk. Penduduk Indonesia dan sumber daya manusia harus seimbang. Negara ini hanya memiliki sedikit orang. Sumber daya manusia Indonesia yang langka memungkinkan pertumbuhan yang setara. Kemajuan Indonesia tergantung pada keseimbangan pembangunan desa dan pedesaan. Pembangunan masyarakat desa memperkuat kemampuan dan potensi masyarakat. Keinginan penduduk untuk mengubah nasib, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kemakmuran mendorong pertumbuhan masyarakat pedesaan. Setiap orang menginginkan kehidupan spiritual, fisik, dan sosial yang memuaskan. Tidak semua orang akan kaya. Semua orang menghadapi ini setiap hari.

Hadirnya persoalan menuntut masyarakat memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menggali dan menyelesaikannya dari berbagai sudut pandang. Keterbatasan masyarakat dalam menghadapi tantangan saat ini merupakan hasil dari keterbatasan yang ada. Ketidakpastian tentang metode solusi adalah kerentanan. Faktor internal dan eksternal menyebabkan dilema ini.

Mempertimbangkan kesulitan yang ada, metode atau rangkaian kebijakan baru harus terus dikembangkan masyarakat. Indonesia terdiri dari banyak daerah dengan budaya dan sumber daya masyarakat yang berbeda. Dengan demikian pemerintah harus menetapkan rencana pembangunan berdasarkan karakteristik dan penyebab daerah. Setiap pemerintahan mengikuti perkembangan Top-Down dan Bottom-Up. Pembangunan dari atas ke bawah dipimpin oleh pemerintah,

sedangkan pembangunan dari bawah ke atas melibatkan masyarakat. Setiap sistem politik menganut sentralisasi, yang dinilai gagal, disusul desentralisasi, sehingga melahirkan otonomi daerah sesuai dengan tuntutan daerah masing-masing. Dihasilkan UU Otonomi Daerah dan Desa yang digunakan masing-masing daerah untuk berkembang.

Otonomi daerah diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA, 2015). Mengatur pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia. Tata pemerintahan yang baik berdasarkan otonomi daerah membantu mencapai tujuan pembangunan dengan memungkinkan pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk mengoperasikan daerah mereka sesuai dengan kapasitas mereka sendiri. Dengan otonominya, provinsi dan desa dapat menjamin pertumbuhan yang tepat dan efektif.

Nyatanya, tidak semuanya bisa berjalan mulus; Jika penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai subjek dan objek tidak dapat melihat dan mengoptimalkan potensi yang ada, maka pembangunan kesejahteraan sosial akan sulit dilakukan. Kurangnya sumber daya manusia untuk menangani potensi yang ada, khususnya di daerah pedesaan, menambah tantangan pembangunan. Bagian penting dari masyarakat dilakukan, yang harus dimodifikasi untuk memungkinkan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat mempromosikan swadaya, memperbaiki lingkungan dan perumahan, dan menciptakan bisnis ekonomi desa dan lembaga keuangan. Pemberdayaan masyarakat mengangkat harkat dan martabat masyarakat

miskin dan terbelakang. Pemberdayaan memperkuat yang kurang beruntung. Pemberdayaan melibatkan penguatan warga dan institusi. Gerakan pemberdayaan ini harus mendorong keuletan, kehematan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketika individu bersatu untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial, mereka diberdayakan. Program ini menyoroti pemberdayaan masyarakat. Efek jangka panjang dari upaya pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan dapat diatasi melalui pemberdayaan masyarakat. Menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan pemerintah desa membutuhkan keseimbangan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah salah satu jenis adaptasi.

Berdasarkan fakta diatas, maka peneliti mengangkat judul Tahap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat di Petung Sewu, Dau, Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tahapan-tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Petung Sewu terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

- b. Dan untuk mengetahui faktor - faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Petung Sewu yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan sebagai konsekuensi menyaksikan kesulitan di lapangan dan menerapkan disiplin ilmu melalui karya peneliti.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahrudin Adi. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Muammil dan Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. MitraWacana Media.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudi Bahrudin. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Social Agency Baru.
- Suharto Edi. 2017. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Totok dan Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.

### Jurnal

- Makmur. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Brambang*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Nardin. 2019. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Wulandary. 2019. *Analisis Kemampuan Sumber Daya Berbasis Komunitas Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Wurangan, Mikhael. 2016. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat. Jurnal FISIP.

### Undang-undang

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.